

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiantoni, *Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Tinggi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016).
- Amnesty International, *Amnesty International Handbook*, (London: Amnesty International Publications, 2002).
- Andreas O'Shea, *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, (The Hague: Kluwer Law International, 2002).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Universitas Pamulang Press, 2008).
- Basuki Kurniawan, *Politik Hukum di Indonesia*, (Bondowoso: CV Licensi, 2020).
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: HAWA dan AHWA, 2017).
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020).
- Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006).
- Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, (Jakarta: Krakatauw Book, 2010).
- Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: ELSAM, 2001).
- Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016).
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Krisna Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, (Bandung: Grafiti Kuntjoro, 2003).

Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum: Rangkuman Istilah dan Pengertian dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, dan Hukum Lingkungan*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

S. F. Marbun dan Deno Kamelus, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Sudikno Mertokusumo, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, (Jateng: Maha Karya Pustaka, 2019).

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009).

Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019).

B. Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

Ahmad Murhadi, "Tinjauan Yuridis Pemberian Amnesti Kepala Negara terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pemberian Amnesti Presiden terhadap Baiq Nuril)," (Skripsi Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).

Della Luysky Selian dan Cairin Melina, "Freedom of Expression in the Era of Democracy: Records of Human Rights Enforcement," *Lex Scientia Law Review* 2 (November 2018).

Dwi Tania, Amiruddin, dan Ufran, "Pemberian Amnesti dalam Kasus Pidana ITE oleh Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres)," *Jurnal Kertha Semaya* 10 (Maret 2022).

Faidlur Rohmah, "Analisis Tindak Pidana ITE Berdasarkan Perkara Baiq Nuril," (Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2020).

Heri Suandi Banurea, "Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti Menurut Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Studi Kasus Pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril)," (Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

- Lisnawaty W. Badu dan Ahmad, "Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ius Civile* 5 (Oktober 2021).
- Louis Joinet, "Study on Amnesty Laws and Their Role in the Safeguard and Promotion of Human Rights," UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/16, (21 Juni 1985).
- Mei Susanto, "Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden," *Jurnal Yudisial* 9 (Desember 2016).
- Shanti Dwi Sartika, "Amnesti bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?," *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 14 (Juli 2019).
- Slamet Riyanto, "Kebijakan Formulasi dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia, (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2004).
- Sujatmiko dan Willy Wibowo, "Kebijakan Pemberian Amnesti bagi Pelaku Tindak Pidana Non Politik di Era Presiden Joko Widodo," *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia, dan Keadilan (Sentuhan Keadilan)*, (2022).
- Supriyadi, "Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik," *Mimbar Hukum* 22 (Februari 2010).
- Suyogi Imam Fauzi, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51 (Juli-September 2021).
- T. Eric Satria, "Analisis Yuridis Pemberian Amnesti oleh Presiden terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)," (Skripsi Sarjana Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).
- Untung Dwi Hananto, "Kekuasaan Presiden dalam Pemberian Grasi Menurut UUD 1945," *Jurnal Masalah Masalah Hukum (MMH)* 42 (April 2013).
- Urbanus Ura Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Konstitusi* 14 (Juni 2017).
- Vivi Andriyani, "Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Banda

Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna),” (Skripsi Sarjana Sarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022).

Winda Sumantri Rahayu, “Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Amnesti kepada Narapidana Ditinjau Menurut Siyasa Dusturiyah,” (Skripsi Sarjana UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022).

Yakub Amin, “Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW pada Peristiwa Fathu Mekkah,” *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4 (Juni 2021).

Yogi Prasetyo, “Hati-Hati Ancaman Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Legislasi Indonesia* 18 (Desember 2021).

C. Peraturan Perundangan-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Darurat tentang Amnesti dan Abolisi*, UU Drt Nomor 11 Tahun 1954, LN No. 146, TLN No. 730.

Indonesia, *Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, UU Nomor 9 Tahun 1998, LN No. 181, TLN No. 3789.

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN No. 165, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU Nomor 40 Tahun 1999, LN No. 166, TLN No. 3887.

Indonesia, *Undang-Undang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)*, UU Nomor 12 Tahun 2005, LN No. 119, TLN No. 4558.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN No. 58, TLN No. 4843.

Indonesia, *Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 Tahun 2016, LN No. 251, TLN No. 5952.

Indonesia, *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, UU Nomor 2 Tahun 2018, LN No. 29, TLN No. 6187.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [*Herziene Inlandsche Reglement*], diterjemahkan oleh C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 2013).

Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1909 K/PID.SUS/2021 tanggal 29 Juli 2021.

Menteri Sekretaris Negara, *Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan Presiden*, Permensesneg Nomor 15 Tahun 2016.

Pengadilan Negeri Banda Aceh, Putusan PN Banda Aceh Nomor 432/PID.SUS/2019/PN BNA tanggal 21 April 2020.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan PT Banda Aceh Nomor 104/PID/2020/PT BNA tanggal 16 Juni 2020.

Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Kementerian Sekretariat Negara*, Perpres Nomor 24 Tahun 2015, BN No. 32.

Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pemberian Amnesti untuk Saiful Mahdi*, Keppres Nomor 17 Tahun 2021.

D. Internet

Adi Briantika, "Kasus Saiful Mahdi Membuktikan SKB UU ITE Tak Berguna & Tetap Karet," <https://tirto.id/>, diunduh 31 Agustus 2022.

Balitbang Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Hak Prerogatif Presiden dalam Bidang Yudisial adalah Membuat Keputusan Terkait dengan Pemberian Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi," <https://www.balitbangham.go.id/>, diunduh 25 Maret 2023.

Dian Dwi Jayanti, "Perbedaan 'Sengaja' dan 'Tidak Sengaja' dalam Hukum Pidana," <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 11 November 2023.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), “Pidana Makar dalam Hukum HAM Internasional,” *Amicus Curiae* Nomor: 78/SK-KontraS/V/2020, (14 Mei 2020).

Nafiatul Munawaroh, “Kritik Pemerintah di Medsos, Bisakah Dipidana?,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 18 Desember 2023.

Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai Unsur ‘Sengaja’ dalam Hukum Pidana,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 14 November 2023.

Rofiq Hidayat, “DPR-Presiden Sepakat Beri Amnesti untuk Saiful Mahdi,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 8 Agustus 2023.

Wahyuni Sahara, “Awal Mula Saiful Mahdi Dijerat UU ITE hingga Dapat Amnesti dari Jokowi,” <https://nasional.kompas.com/>, diunduh 30 Agustus 2022.

Willa Wahyuni, “Mengenal Perbedaan Grasi dan Amnesti,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 17 Mei 2023.